

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Barata, Atep Adya, 2003, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Mujibur Rahman Khairul Muluk. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah. Pertama*. 1 Malang Bayumedia Publishing, 2007
- Diwiyanto, Agus dkk, *Kinerja Tata Pemerintah Daerah Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, (2011), *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Malang, Setara Press (Kelompok Intrans Publishing)
- E, Utrech, 1988 *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indoensia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gautama, sudargo, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung
- HR, Ridwan dan Achmad Sodik sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung
- Kencana Syafiie, Inu dan Djamiluddin Tanjundung, Supardan Modeong, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.
- Ridwan Juniarso, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung
- Sampara, Lukman, 1999 *Kualitas Pelayanan, Lembaga Administrasi Publik RI*, Jakarta
- Sinamo, Nomensen Dinammo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Sugandha, Daan, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Intermedia, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

## **C. JURNAL**

Emiliana Laku Mali, 2011, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*, Tesis, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Rodya Anissa Santi, 2013, *Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Terhadap Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak*, Tesis, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

## **D. INTERNET**

<http://jogja.tribunnews.com/2016/02/16/bantul-siap-jadi-percontohan-program-kartu-identitas-anak>. Akses tanggal 20 April 2018 jam 11.00

[https://www.kompasiana.com/orit/pro-kontra-kartu-identitas-anak-kia\\_56bdda328e7e610f0bec6518](https://www.kompasiana.com/orit/pro-kontra-kartu-identitas-anak-kia_56bdda328e7e610f0bec6518) Akses Tanggal 1 Mei 2018 jam 12.30

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/penerapan-kia-segera-diuji-coba-di-50-kabupatenkota> akses tanggal 23 April 2018 jam 07.30

<http://jogja.tribunnews.com/2016/02/16/bantul-siap-jadi-percontohan-program-kartu-identitas-anak> akses tgl 19 Mei 2018 Jam 10.00



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Pembelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Pemerintahan Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta**  
FAJRIATUL MUKARRAMAH, Richo Andi Wibowo S.H.,LLM., Ph.D  
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>